



► Respons Perlindungan Sosial

Mei 2020

► Tunjangan sakit selama cuti sakit dan masa karantina: Respons negara dan pertimbangan kebijakan dalam konteks COVID-19

Poin-poin utama

Krisis kesehatan COVID-19 telah mengungkap kesenjangan jangkauan yang besar dalam hal hak atas perlindungan sosial saat sakit. Krisis ini telah mengungkap dua dampak buruk dari kesenjangan jangkauan tunjangan sakit:

- Tidak adanya tunjangan ini mendorong orang untuk tetap bekerja saat sakit atau saat mereka seharusnya melakukan karantina mandiri, sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Efek buruk ini telah terkodumentasikan dampaknya terhadap pencegahan krisis kesehatan publik sebelumnya dan keselamatan dan kesehatan kerja.
- Hilangnya pendapatan selama sakit meningkatkan risiko kemiskinan bagi pekerja dan keluarganya. Risiko menjadi miskin bahkan lebih jelas lagi bila mereka tidak mendapat skema asuransi kesehatan sosial nasional atau layanan kesehatan nasional dan harus menanggung biaya perawatan kesehatan tersebut. Dampak pada kesehatan, pendapatan, dan kesejahteraan rumah tangga yang terdampak oleh penyakit ini berlangsung cepat dan mungkin juga memiliki dampak yang bertahan lama.

Krisis yang terjadi saat ini menunjukkan pentingnya tunjangan sakit dan menekankan perlunya langkah-langkah mendesak jangka pendek untuk menutup kesenjangan jangkauan dan kecukupan dalam tunjangan sakit, misalnya:

- Memperluas jangkauan untuk semua. Untuk memperluas jangkauan tunjangan sakit yang secara cepat diperlukan mobilisasi sumber daya keuangan tambahan. Upaya pertama harus difokuskan pada perluasan jangkauan kepada kelompok yang belum terjangkau, tanpa memandang jenis pekerjaan mereka. Hal ini mungkin memerlukan penyesuaian atau pelonggaran kriteria kelayakan untuk mendaftar skema yang sudah ada atau skema baru.
- Memperluas jangkauan tunjangan sakit untuk menanggung, misalnya, masa karantina dan perawatan anggota keluarga yang sakit.
- Meningkatkan kecukupan tunjangan sakit dengan meningkatkan tingkat manfaat untuk memastikan jaminan pendapatan yang efektif bagi mereka dan keluarganya yang terdampak oleh penyakit.
- Memastikan pencairan tunjangan sakit yang cepat, misalnya dengan menghapus masa tunggu tanpa kompensasi (jika ada) atau memanfaatkan teknologi untuk memastikan pembayaran yang cepat.

► Respons Perlindungan Sosial

Tunjangan sakit selama cuti sakit dan masa karantina

Peran kunci tunjangan sakit dalam merespons krisis kesehatan COVID-19

Krisis kesehatan COVID-19 mengungkap kesenjangan yang besar dalam hal hak atas perlindungan saat sakit (ILO 2020e). Banyak pekerja, terutama mereka yang bekerja di beragam bentuk pekerjaan dan pekerja mandiri, tidak terlindungi atau terlindungi secara tidak memadai oleh tunjangan sakit yang dibiayai secara kolektif (lihat **Kotak 1**). Hal ini mengancam kesehatan masyarakat karena pekerja yang tidak memiliki jaminan pendapatan selama sakit mungkin terpaksa bekerja saat sakit, sehingga kemungkinan akan menulari orang lain. Selain itu, tidak adanya jaminan pendapatan selama sakit menimbulkan risiko kemiskinan bagi pekerja dan keluarganya, dengan dampak ekonomi dan sosial yang berpotensi berlangsung lama.

Krisis ini menyoroti pentingnya tunjangan sakit dan menekankan perlunya langkah-langkah mendesak jangka pendek untuk menutup kesenjangan jangkauan dan kecukupan dalam tunjangan sakit (ILO 2020b; 2020f; 2020g), misalnya:

- Memperluas jangkauan ke kelompok yang tidak tercakup, tanpa memandang jenis ketenagakerjaan mereka, dengan menyesuaikan atau melonggarkan kriteria kelayakan skema yang sudah ada atau mengenalkan tunjangan baru. Ini akan memerlukan mobilisasi sumberdaya keuangan tambahan dari anggaran pemerintah untuk perluasan jangkauan tunjangan sakit yang bersifat cepat.¹
- Memperluas jangkauan tunjangan sakit agar mencakup, misalnya, tunjangan untuk karantina dan perawatan anggota keluarga yang sakit.
- Meningkatkan kecukupan tunjangan sakit dengan meningkatkan manfaat tunjangan untuk memastikan jaminan pendapatan yang efektif bagi mereka dan keluarganya yang terdampak oleh penyakit.
- Memastikan pencairan tunjangan sakit yang cepat, misalnya dengan menghapus masa tunggu tanpa kompensasi (jika ada) atau memanfaatkan teknologi untuk memastikan pembayaran yang cepat.

Krisis kesehatan COVID-19 merupakan seruan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial berkelanjutan dalam jangka menengah. Penguatan sistem ini harus dilakukan dengan memperkuat kerangka hukum, sistem administrasi dan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan dan adil (OECD 2020), dan juga akan memastikan bahwa sistem semacam itu siap untuk krisis berikutnya.

Kotak 1: cuti sakit dan tunjangan sakit: definisi

- Cuti sakit mencakup kebutuhan untuk mengambil cuti ketika seseorang sakit. Hal ini terpisah dari hak libur dan harus didefinisikan di dalam UU Ketenagakerjaan. Contoh di beberapa negara menunjukkan adanya penangguhan penghasilan selama cuti ini. Selain itu, beberapa negara menentukan jangka waktu di mana terdapat kewajiban hukum bagi pemberi kerja untuk membayar gaji pekerja (cuti sakit dibayar melalui kewajiban pemberi kerja).
- Tunjangan sakit menjamin diberikannya penghasilan yang memadai selama cuti sakit ketika terjadi penangguhan pendapatan.

Investasi jangka panjang dalam membangun sistem berkelanjutan untuk pemberian tunjangan sakit sangat penting untuk mendukung upaya kesehatan masyarakat dalam rangka pencegahan penyakit menular, meningkatkan kesehatan dan mengurangi risiko kemiskinan (Raub et al. 2018). Ketika melakukan investasi jangka panjang semacam itu, negara harus mempertimbangkan dampak dari berbagai bentuk pemberian tunjangan sakit. Secara khusus, liputan media tentang krisis kesehatan COVID-19 semakin menunjukkan keterbatasan sistem yang hanya mengandalkan tanggung-jawab pemberi kerja.

Meskipun beberapa negara saat ini menerapkan langkah-langkah menutup kesenjangan untuk memperluas jangkauan ke kategori pekerja yang tidak terjangkau, dalam jangka panjang mereka mungkin perlu memikirkan kembali beberapa fitur desain dan struktur pembiayaan tunjangan sakit untuk:

- Memasukkan hak atas cuti sakit ke dalam UU bila saat ini belum tercantum dan memastikan jangkauan universal tunjangan sakit.
- Mempertimbangkan rancangan skema yang memungkinkan pendekatan pencegahan jika terjadi pandemi.²
- Memastikan mekanisme pembiayaan yang kuat, berkelanjutan, dan adil berdasarkan mekanisme pengumpulan risiko (*risk pooling*) dan solidaritas yang luas.

Banyak negara telah melakukan tindakan cepat untuk meningkatkan akses ke tunjangan sakit dalam konteks krisis kesehatan COVID-19. Pertimbangan kebijakan yang diuraikan di bawah ini didasarkan pada respons negara yang ada dan panduan yang diberikan oleh standar jaminan sosial ILO.

¹ Termasuk melalui langkah-langkah dukungan anggaran internasional.

² Misalnya penangguhan atau penghapusan masa tunggu, dimasukkannya jangkauan untuk karantina dan perluasan ruang lingkup cuti sakit untuk mencakup merawat tanggungan yang sakit.

Langkah jangka pendek untuk memperluas jangkauan dan kecukupan tunjangan sakit

Tunjangan sakit, termasuk dalam situasi karantina, memainkan peran penting dalam memperlambat penyebaran virus (lihat kotak 1). Beberapa negara telah mengidentifikasi jaminan pendapatan bila terjadi sakit sebagai langkah prioritas dalam paket stimulus mereka. Contohnya:

- Ekuador meminta dukungan dari International Monetary Fund (IMF) untuk paket stimulus yang mencakup langkah-langkah jaminan pendapatan (Infobae 2020). Hal ini menggambarkan perlunya dukungan internasional untuk negara-negara yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk sepenuhnya mendanai kebijakan mereka terhadap krisis ini.
- Irlandia³ dan Kanada⁴ secara eksplisit memasukkan ke dalam paket stimulus mereka alokasi sumberdaya yang signifikan untuk memperluas jangkauan dan kecukupan tunjangan sakit untuk memastikan cuti sakit berbayar dapat diakses oleh semua yang membutuhkan (Canada 2020; Ireland 2020).

Agar efektif, tunjangan sakit harus diperluas untuk semua orang. Upaya-upaya khusus diperlukan untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau, dengan fokus khususnya pada pekerja mandiri, pekerja dalam bentuk pekerjaan baru dan non-standar dan sektor informal (ILO 2019a). Banyak pekerja layanan kesehatan yang sekarang berada di garis depan dan berisiko tinggi terinfeksi (Kirsch 2020) termasuk dalam kategori tersebut, sehingga menimbulkan tantangan lain dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (ILO 2020d). Banyak dari pekerja ini adalah perempuan (Mbugua 2020) dan banyak dari mereka merupakan kelompok pekerja rentan yang sebagian besar bekerja di sektor informal, misalnya migran dalam situasi ilegal (Rondon 2020). Kurangnya cakupan universal tunjangan sakit telah diidentifikasi sebagai salah satu tantangan utama bagi keberhasilan strategi penanggulangan virus dan negara-negara telah mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki situasi ini. Contohnya:

- Singapura akan membayar pemberi kerja yang pekerjanya yang dikarantina 100 dolar Singapura

(US\$ 68,5) per hari selama durasi karantina mereka. Tunjangan tersebut juga akan dibayarkan kepada pekerja mandiri (ILO 2020g).

- Di Inggris, tunjangan sakit telah diperluas ke semua pekerja, termasuk pekerja lepas atau *gig economy workers*, yang sedang melakukan isolasi mandiri (United Kingdom 2020a; 2020b). Irlandia telah memperluas tunjangan sakit ke semua pekerja yang sebelumnya dikecualikan (Ireland 2020). Italia telah menetapkan tunjangan sakit sementara untuk pekerja mandiri (Gagliardi 2020).

Parameter tunjangan sakit mungkin perlu disesuaikan dan syarat kelayakan dilonggarkan untuk merespons kebutuhan cepat dalam pencegahan COVID-19. Negara-negara yang memiliki sistem tunjangan sakit untuk memastikan bahwa pekerja yang sakit dibayar selama cuti sakit dapat merespons dengan cepat.⁵ Krisis kesehatan ini menunjukkan tantangan berkenaan dengan ruang lingkup dan tingkat tunjangan yang ada dan masa tunggu untuk pembayaran tunjangan sakit atau hak cuti sakit berbayar, yang dapat memaksa sebagian pekerja untuk tetap datang bekerja meskipun terdapat risiko kesehatan.⁶ Selain itu, mekanisme pencairannya mungkin perlu disesuaikan.

- Ruang lingkup tunjangan: Beberapa negara telah mengambil langkah-langkah cepat untuk memperluas ruang lingkup tunjangan sakit berkenaan dengan:⁷
 - Karantina. Jepang telah memperluas akses ke tunjangan sakit tunai kepada orang yang dikarantina dan menghapus persyaratan mendapatkan surat keterangan medis (ILO 2020g). Di Vietnam, orang yang terinfeksi yang dikarantina di luar rumah berhak mendapatkan tunjangan makan harian sebesar 60.000 dong (2,59 dolar Amerika), sementara orang yang dikarantina di rumah menerima 40.000 dong (1,72 dolar Amerika) (Phuong et al. akan terbit).⁸
 - Tanggung-jawab perawatan untuk keluarga yang sakit. Beberapa negara, misalnya Perancis, juga telah memperluas ruang lingkup tunjangan sakitnya dengan memperluasnya ke pekerja yang sedang melakukan isolasi mandiri atau merawat anaknya (Fortunato 2020).

³ Paket reformasi telah disetujui untuk upah sakit, tunjangan sakit dan tunjangan tambahan yang dirancang untuk memastikan bahwa karyawan dan pekerja mandiri dapat mematuhi saran medis untuk melakukan isolasi mandiri, jika perlu, sementara penghasilan mereka dilindungi hingga tingkat yang jauh lebih besar daripada sistem kesejahteraan sosial saat ini. Kebijakan diperkirakan menelan biaya €2,4 miliar.

⁴ Pemerintah telah mengumumkan alokasi 5 juta dolar Kanada untuk mendukung tunjangan sakit.

⁵ Mekanisme berbeda yang digunakan oleh negara-negara untuk memberikan cuti sakit berbayar didefinisikan di kotak 1.

⁶ Standar jaminan sosial ILO menetapkan bahwa masa tunggu semacam itu tidak boleh lebih dari tiga hari (ILO 2020e).

⁷ Langkah-langkah ini sejalan dengan Rekomendasi Perawatan Medis dan Tunjangan sakit, 1969 (No. 134) (ILO 2020e).

⁸ "Kasus-kasus karantina yang dilakukan di luar rumah berhak atas tunjangan makan harian sebesar VND 60.000 (2,59 dolar Amerika), sementara yang dilakukan di rumah sebagai bagian dari tindakan karantina menerima 40.000 dong/1,72 dolar Amerika. Mengingat bahwa upah bulanan rata-rata di Vietnam adalah 150 dolar Amerika, ini akan memangkas penghasilan seseorang sebanyak 2-3 kali sementara tetap dikarantina dan tidak dapat bekerja." (Phuong et al. akan terbit). Data ini mempertanyakan kecukupan perlindungan ini.

► Respons Perlindungan Sosial

Tunjangan sakit selama cuti sakit dan masa karantina

- Tingkat tunjangan. Irlandia telah menaikkan tingkat tunjangan sakit dari 203 euro menjadi 305 euro per minggu untuk menahan penularan COVID-19.⁹
- Masa tunggu. Beberapa negara telah menghapus masa tunggu bila melibatkan penangguhan pendapatan. Contohnya, Kanada telah menghilangkan masa tunggu satu minggu dan negara-negara lain, misalnya Irlandia, Swedia¹⁰ dan Denmark¹¹ telah mengambil langkah yang sama. Australia telah menghapuskan masa tunggu satu minggu untuk bantuan pendapatan, termasuk tunjangan sakit (Australia 2020).
- Pencairan: Langkah-langkah untuk memastikan pencairan cepat tunjangan sakit, termasuk penggunaan teknologi untuk memastikan pembayaran cepat. Cina telah menerapkan peningkatan penggunaan platform daring untuk layanan jaminan sosial (China 2020).

Perlunya respons yang terkoordinasi

Untuk mencegah pemiskinan, baik akses efektif ke layanan perawatan kesehatan tanpa menghadapi kesulitan keuangan maupun tunjangan sakit tunai yang memadai, sangatlah diperlukan (ILO 2020h; Lönnroth et al. 2020). Diperlukan koordinasi yang erat antara tunjangan sakit tunai dan tunjangan perawatan kesehatan. Dimasukkannya pencegahan, diagnosis dan pengobatan dalam paket tunjangan perawatan kesehatan juga penting dan membutuhkan alokasi anggaran yang memadai untuk sistem kesehatan (Barroy 2020).

- Di Filipina, lembaga asuransi kesehatan sosial nasional, Philhealth, membentuk paket terpadu perawatan dan uang tunai – paket PhilHealth COVID-19 – yang mencakup tunjangan isolasi untuk memberikan dukungan keuangan (14.000 peso Filipina; 273,6 dolar Amerika) untuk orang dalam karantina (ILO 2020g).
- Di banyak negara, respons terkoordinasi sistem perlindungan kesehatan dan sosial telah berkontribusi pada penanggulangan dampak epidemi. Misalnya di Cina, respons gabungan ini mencakup rencana jaminan kesehatan, pembangunan rumah sakit baru, perekrutan staf tambahan, program perlindungan kesehatan sosial universal yang sudah ada sebelumnya, kontribusi asuransi sosial yang dimodifikasi, dan langkah-langkah luar biasa untuk menambah pendapatan pada saat sakit atau isolasi (ILO 2020b).

Pemerintah juga telah mengupayakan pendekatan administratif yang bijaksana untuk mendukung protokol jaga jarak fisik, misalnya pengurusan klaim penggantian biaya medis secara daring (ILO 2020b).

Krisis ini mungkin memerlukan langkah-langkah bantuan pendapatan sama rata dalam bentuk bantuan sosial di negara-negara di mana tidak ada tunjangan sakit yang dapat dengan cepat diperluas. Contohnya:

- Di Argentina, pemerintah telah memutuskan untuk membentuk tunjangan tunai sama rata sekali-bayar melalui saluran yang telah ada dari lembaga yang bertanggung-jawab menyediakan tunjangan keluarga. Mereka juga telah mengumumkan dimasukkannya pekerja rumah tangga dalam pekerjaan formal maupun informal sebagai penerima manfaat (Los Andes 2020).
- Di Irlandia, penghapusan persyaratan uji kemiskinan (*means test*) untuk tunjangan kesejahteraan tambahan sehubungan dengan kasus isolasi mandiri telah diberlakukan dan pekerja mandiri berhak menerima tunjangan sakit atau tunjangan kesejahteraan tambahan tanpa uji kemiskinan ini (Ireland 2020).
- Di Ekuador, pemerintah telah menetapkan tunjangan kontinjensi khusus untuk COVID-19 yang ditujukan pada pekerja yang terinfeksi maupun yang terdampak di sektor informal dan rumah tangganya. Tunjangan ini dibagikan melalui saluran program bantuan sosial untuk keluarga yang sudah ada (El Mercurio 2020).

Tunjangan sakit harus dikoordinasikan dengan serangkaian intervensi perlindungan sosial untuk mendukung jaminan pendapatan bagi semua, termasuk mereka yang tidak sakit tetapi terdampak kebijakan pemberhentian kerja dan penurunan ekonomi. Dalam hal ini, harus ada kontinum antara tunjangan sakit selama cuti sakit, perlindungan pengangguran dalam hal kehilangan pekerjaan atau penghentian kerja sementara dan bantuan pendapatan untuk rumah tangga dalam hal penghentian kegiatan ekonomi umum dan krisis keuangan dan ekonomi (ILO 2020i; 2020a). Dalam hal ini, koordinasi yang kuat diperlukan dan harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip partisipasi dan dialog sosial (ILO 2020f; akan terbit). Contohnya:

- Di Argentina, langkah-langkah khusus yang mengkoordinasikan intervensi perawatan dan dukungan ekonomi telah dilakukan untuk menanggapi kebutuhan spesifik para penyandang disabilitas (Argentina 2020).

⁹ Untuk jangka waktu maksimal dua minggu isolasi diri bersertifikat medis atau durasi ketidakhadiran seseorang yang bersertifikat medis dari bekerja karena diagnosis Covid-19 (Ireland 2020).

¹⁰ Swedia telah mengurangi waktu administrasi yang diperlukan untuk pembayaran cuti sakit dengan menghapuskan hari kualifikasi sakit karena COVID-19 sehingga pekerja akan menerima tunjangan sakit sejak mereka harus absen kerja karena sakit.

¹¹ Lihat Pemerintah Irlandia (2020); *Krisinformation.Se* 2020; Pemerintah Denmark (2020); Pemerintah Kanada (2020).

¹² ILO memperkirakan bahwa jam kerja dapat menurun sebesar 10,5 persen pada kuartal kedua 2020, yang setara dengan 305 juta pekerja penuh waktu, yang mengakibatkan hilangnya banyak pekerjaan dan pendapatan (ILO 2020a). Sebagai perbandingan, krisis keuangan global tahun 2008 meningkatkan pengangguran sebesar 22 juta pekerja penuh waktu.

► Respons Perlindungan Sosial

Tunjangan sakit selama cuti sakit dan masa karantina

Pertimbangan untuk merancang kebijakan tunjangan sakit yang efektif untuk masa depan

Cara tunjangan sakit dibiayai dan diberikan tidaklah netral bila menggunakan prinsip tidak ada satupun yang tertinggal (ILO 2020e). Perluasan jangkauan secara cepat dalam konteks COVID-19 akan membutuhkan sumberdaya tambahan. Jika tunjangan sakit diharapkan memainkan peran pencegahan, maka diperlukan mekanisme yang dibiayai secara kolektif berdasarkan solidaritas. Membebaskan tanggung-jawab hanya kepada pemberi kerja tidak memberikan solusi yang layak, sebagaimana sangat banyak ditunjukkan oleh krisis kesehatan saat ini, dan juga rentan terjadi banyak pekerja yang dikecualikan. Pekerja mandiri pada dasarnya dikecualikan dan banyak negara dengan kewajiban hanya bertumpu pada pemberi kerja telah mengambil langkah-langkah untuk memberikan tunjangan yang dibiayai oleh pajak sebagai respons terhadap krisis. Contohnya, di Amerika Serikat, Pemerintah telah meningkatkan upayanya untuk menjembatani kesenjangan jangkauan yang ditimbulkan oleh tunjangan sakit yang diserahkan kepada pemberi kerja, yang telah menunjukkan banyak keterbatasan dalam hal pencegahan penyakit menular selama krisis kesehatan sebelumnya misalnya SARS, MERS dan lainnya. (Kain Miller 2020; Drago 2010; James 2019).

Jika pandemi ini berlanjut, maka sumberdaya tambahan mungkin diperlukan untuk memastikan pencairan tunjangan dan keberlanjutan skema finansial.

Membentuk skema tunjangan sakit melalui mekanisme yang didanai secara kolektif agar siap menghadapi krisis berikutnya harus menjadi prioritas ketika negara-negara mencapai tahap pemulihan. Merencanakan perluasan jangkauan yang berkelanjutan dan pengumpulan informasi secara rutin untuk intervensi saat ini dan di masa mendatang akan menjadi sangat penting. Standar ILO memberikan panduan yang bermanfaat tentang prinsip-prinsip untuk menetapkan atau memperkuat skema tunjangan sakit dalam proses dialog sosial (ILO 2020h; 2020e). Mempertimbangkan dampak buruk dari mengandalkan tanggung-jawab pemberi kerja, maka perlu diprioritaskan pembiayaan kolektif yang kuat untuk tunjangan sakit. Langkah-langkah darurat yang diambil selama krisis dalam hal perluasan jangkauan harus ditransformasikan dalam jangka menengah dan panjang menuju skema atau serangkaian skema yang kokoh, adil dan dibiayai secara berkelanjutan. Sangat penting bahwa kelompok-kelompok yang sebelumnya dikecualikan yang telah dimasukkan selama krisis tidak akan lagi dikeluarkan dari jangkauan. Juga penting untuk memastikan distribusi tanggung-jawab keuangan yang adil, sehingga biaya ketenagakerjaan tidak sepenuhnya dialihkan kepada pembayar pajak dan keberlanjutan finansial sistem tersebut dapat dipastikan (ILO 2019b; Global Commission on the Future of Work 2019).

- Kunjungi [halaman web](#) perlindungan sosial kesehatan kami dan [portal data](#)

Dokumen ini diterjemahkan dengan dukungan dari Fast Retailing Co., Ltd. melalui Proyek ILO/UNIQLO (Unemployment Protection in Indonesia: Quality Assistance for Workers Affected By Labour Adjustments)

Dokumen ini disiapkan oleh Lou Tessier dengan masukan dari Kroum Markov dan Christina Behrendt, dan telah ditelaah kembali oleh Tim Teknis Perlindungan Sosial Global, ACTRAV dan ACTEMP.

Editor dari seri Laporan Respons Perlindungan Sosial adalah Shahra Razavi, Direktur Departemen Perlindungan Sosial

Departemen Perlindungan Sosial
 ► socpro@ilo.org
 ► Social Protection Platform:
www.social-protection.org

International Labour Organization
 4 route des Morillons
 1211 Genève 22
www.ilo.org

Kunjungi website kami untuk pembaruan berkala dari respons dunia terhadap krisis COVID-19
 ► ilo.org/global/topics/coronavirus
 ► www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=62&lang=EN

Daftar Pustaka

- Argentina. 2020. 'Medidas de Cuidado para las Personas con Discapacidad ante El Nuevo Coronavirus COVID-19'.
- Australia. 2020. 'Job Seekers - Coronavirus (COVID-19)'. Department of Foreign Affairs and Trade.
- Barroy, H el ene. 2020. 'How to Budget for COVID-19 Response? A Rapid Scan of Budgetary Mechanisms in Highly Affected Countries'. WHO.
- Kanada. 2020. 'Coronavirus Disease (COVID-19) – Employment and Social Development Canada'. Notices. 17 Maret 2020.
- China, Department of Unemployment Insurance. 2020. 'Announcement of the Government of China'. Work News, 12 Februari.
- Cain Miller, Clare. 2020. 'Who Qualifies for Paid Leave Under the New Coronavirus Law'. *The New York Times*, 19 Maret.
- Denmark. 2020. 'The Tripartite Agreement Should Help Workers'. Press Release, 15 Maret.
- Drago, Robert, and Kevin Miller. 2010. 'Sick at Work: Infected Employees in the Workplace During the H1N1 Pandemic'. Institute for Women's Policy Research.
- El Mercurio. 2020. ' C mo Aplicar al Bono de Contingencia ante Covid-19?'. 23 Maret.
- Fortunato, Victor. 2020. 'Coronavirus : 18e Cas en France, Jusqu'  20 Jours d'indemnit s pour les Personnes en Isolement'. *Le Parisien*, 26 Februari.
- Gagliardi, Andrea. 2020. 'Coronavirus. Emergenza Economica, Domenica Il Decreto Da Almeno 15 Miliardi: Stop Versamenti Fisco e Rate Mutui'. 24 Italia, 13 Maret.
- Global Commission on the Future of Work. 2019. 'Work for a Brighter Future'. ILO.
- ILO. 2019a. 'Extending Social Security Coverage to Workers in the Informal Economy: Lessons from International Experience'.
- . 2019b. 'ILO Centenary Declaration for the Future of Work'.
- . 2020a. 'COVID-19 and the world of work. Third edition Updated estimates and analysis'.
- . 2020b. 'Social Protection Policy Responses to the COVID-19 Crisis around the World. Social Protection Monitor'. 6 April.
- . 2020c. 'ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work. Second Edition: Updated Estimates and Analysis'. 7 April.
- . 2020d. 'ILO Standards and COVID-19 (Coronavirus): FAQ: Key Provisions of International Labour Standards Relevant to the Evolving COVID-19 Outbreak'. Version 1.2, 23 Maret.
- . 2020e. 'Sickness Benefits: An Introduction'. Social Protection Spotlight, Mei.
- . 2020f. 'Social Protection Responses to the COVID-19 Crisis: Country Responses and Policy Considerations'. Social Protection Spotlight, 23 April.
- . 2020g. 'Social Protection Responses to the COVID-19 Crisis: Country Responses in Asia and the Pacific'. 25 Maret.
- . 2020h. 'Towards Universal Health Coverage: Social Health Protection Principles'. Social Protection Spotlight, Maret.
- . Forthcoming a. 'Unemployment Protection in the COVID-19 Crisis: Country Responses and Policy Considerations'. Social Protection Spotlight.
- . Forthcoming b. 'Note: The Role of Social Dialogue in Addressing the COVID-19 Crisis'.
- infobae. 2020. 'Ecuador Pide Ayuda al FMI para Paliar Impacto de Pandemia de COVID-19'. 24 Maret.
- Irlandia, Department of the Taoiseach. 2020. 'Government Agrees next Phase of Ireland's Covid-19 Response'. News, 9 Maret.
- James, Phil. 2019. 'Sick Pay, Compensation and the Future of Work'. ILO.
- Kirsch, Thomas. 2020. 'What Happens If Health-Care Workers Stop Showing Up?' *The Atlantic*, 24 Maret.
- L nnroth, Knut, Lou Tessier, Gunnel Hensing, and Christina Behrendt. 2020. 'Income Security in Times of Ill Health – the next Frontier of the SDGs'. *BMJ*, forthcoming.
- Los Andes. 2020. 'Trabajadores Dom sticos Formales e Informales tambi n Podr n Cobrar el Pago de \$10 Mil'. 24 Maret.
- Mbugua, Njeri. 2020. 'Why Chores Done by Women Increase Coronavirus Risk'. *Star*, 23 Maret.
- OECD. 2020. 'Supporting People and Companies to Deal with the Covid-19 Virus: Options for an Immediate Employment and Social-Policy Response'.
- Puong, Bich Tran, Knut L nnroth, Gunnel Hensing, Jennifer Thorpe, Kristi Sidney Annerstedt, Olivia Biermann, Rachel Forse, Salla Atkins, and Tom Wingfield. Forthcoming. 'Income Security during Public Health Emergencies: The Novel Coronavirus (COVID-19) Poverty Trap in Vietnam'. *BMJ*.
- Raub, Amy, Paul Chung, Priya Batra, Alison Earle, BoseBijetri, Judy Jou, Nicol s de Guzman Chorny, Elizabeth Wong, Daniel Franken, and Jody Heymann. 2018. 'Paid Leave for Personal Illness: A Detailed Look at Approaches across OECD Countries'. *WORLD Policy Analysis Center*.
- Rondon, Jesus A. 2020. 'Los Trabajadores Migrantes en la Escena de Pandemia'. *Nuevatribuna.Es*, 24 Maret.
- Swedia, Krisinformation.Se. 2020. 'Abolished Qualifying Day of Sickness Due to Corona Virus', 11 Maret.
- Inggris, Department for Work and Pensions. 2020a. 'Coronavirus Support for Employees, Benefit Claimants and Businesses'. Press Release, 13 Maret.
- , HM Treasury. 2020b. 'Support for Those Affected by Covid-19'. Guidance, 11 Maret.